

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Amrullah, M. Arief, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Arief, Barda Nawawi *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi edisi revisi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Djaja, Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2010.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hatta, Moh, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- I Gede Widhiana Suarda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember: Jember University Press, 2009.
- Jeremy Pope, *Strategi Memebrantas Korupsi: Elemen System Intergritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasm, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010.
- Mokhamad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- Najih, Mokhamad. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Pope, Jeremy, *Strategi Memembrantas Korupsi: Elemen System Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Pradja, Achmad S Soemadi dan Atmasasmita, R, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1979.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suarda, I Gede Widhiana, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Jakarta: Bayu Media, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632)

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223)

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09-HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HN.02-01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan.

C. Internet :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/12/lrevtp-perkara-korupsi-di-indonesia-mencapai-1018-kasus> di akses tanggal 15 Mei 2014

<http://www.beritasatu.com/articles/read/2010/8/971/aulia-pohan-akan-bebas> di akses tanggal 15 Mei 2014

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/296651/38/> di akses tanggal 15 Mei 2014

kamusbahasaIndonesia.org, *kebijakan*. Website Internet :

www.KamusBahasaIndonesia.org, di akses tanggal 28 September 2014

